

Hasil Penelitian

KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKRETARIAT JENDRAL DPR RI MENUJU PARLEMEN MODERN

(INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION CAPABILITIES OF THE SECRETARIAT GENERAL OF PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF INDONESIA TOWARDS A MODERN PARLEMENT)

Indra Iskandar, Syamsul Maarif, Joko Affandi, Anggraini Sukmawati

Sekolah Bisnis Universitas IPB
Jl. Raya Pajajaran, Bogor. Jawa Barat - Indonesia
Email: indra.iskandar@dprri.go.id

Diterima: 16 April 2020; Direvisi: 13 Mei 2020; Disetujui: 04 Juni 2020

ABSTRAK

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) memiliki peran strategis sebagai sistem pendukung terlaksananya tugas dan fungsi dari DPR RI. Ketidakpercayaan publik terhadap parlemen dan ketidakpahaman publik mengenai sistem politik demokrasi dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik. Modernisasi DPR RI mencakup perubahan pola pikir (*mindset*) dan pola kerja (*culture set*) yang didukung teknologi informasi dan komunikasi canggih untuk memudahkan pelaksanaan tugas parlemen sehingga kepercayaan publik terhadap parlemen akan kembali. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Setjen DPR RI sebagai instrumen kelembagaan yang bertugas memberikan pelayanan administratif, teknis-operasional, dan manajerial terhadap pimpinan dan anggota DPR RI. Penelitian bersifat kualitatif dengan analisis data secara deskriptis. Studi dilakukan selama 2 (dua) bulan, yakni Desember 2019-Januari 2020 bertempat di Setjen DPR RI. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam kepada 2 (dua) narasumber. Selain itu, dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh 82 pegawai Setjen DPR RI eselon 1,2 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan kapabilitas TIK setjen DPPRI sudah baik dengan aplikasi-aplikasi yang dibangun untuk kebutuhan pegawai internal, anggota dewan dan masyarakat umum. TIK yang sudah baik ini belum digunakan secara maksimal baik oleh pegawai setjen, anggota DPR RI maupun masyarakat umum dikarenakan sosialisasi yang kurang dan kemampuan penggunaannya. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi dan pelatihan secara masif agar infrastruktur TIK yang sudah ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kapabilitas TIK ini akan menjadikan DPR RI modern yang berarti lebih terbuka, bertanggung jawab, dan mendorong warga negara untuk lebih terlibat dalam kehidupan publik dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan maupun perundang-undangan dengan memberikan informasi yang berkualitas dan akses yang lebih besar ke dokumen dan kegiatan DPR RI atau badan legislatif. Kapabilitas TIK menjadi prasyarat atas tuntutan publik untuk lebih transparan, akuntabel, dan profesional dalam merespon aspirasi masyarakat sebagai tugas utama DPR RI yang didukung oleh Setjen DPR RI.

Kata kunci: kapabilitas, teknologi informasi dan komunikasi, DPR RI, parlemen modern

ABSTRACT

The Secretariat General of People's Representative Council of Indonesia (Setjen DPR RI) has a strategic role as a support system for the implementation of the duties and functions of the Indonesian Parliament. Public distrust of parliaments and public understanding of democratic political systems can result in political instability. The modernization of the DPR RI includes a change in mindset and culture set supported by sophisticated information and communication technology to facilitate the implementation of parliamentary tasks so that public confidence in parliament will return. This study aims to describe the capability of Information and Communication Technology (ICT) at the Secretariat General of the Indonesian Parliament as an institutional instrument tasked with providing administrative, technical-operational, and

managerial services to the leaders and members of the Indonesian Parliament. The study is qualitative with descriptive data analysis. The study was conducted for 2 (two) months, namely December 2019-January 2020 at the Secretariat General of the Indonesian Parliament. Primary data obtained through observation and in-depth interviews with 2 interviewees. In addition, it was collected through a questionnaire filled out by 82 (eighty two) staff members of the Republic of Indonesia General Secretariat echelon 1.2 and 3. The results showed the ICT capability of the DPPRI secretary general was good with applications built for the needs of internal employees, board members and the general public. These good ICTs have not been used maximally either by the secretary general's staff, members of the Indonesian Parliament and the general public due to lack of socialization and the ability of its users. This study recommends massive socialization and training so that existing ICT infrastructure can be utilized to the full. This ICT capability will make the modern DPR RI meaning more open, accountable, and encourage citizens to be more involved in public life and participate in the process of policy making and legislation by providing quality information and greater access to documents and activities. Indonesian Parliament or legislative body. ICT capability is a prerequisite for public demands to be more transparent, accountable, and professional in responding to the aspirations of the people as the main task of the Republic of Indonesia Parliament which is supported by the Secretariat General of the Republic of Indonesia House of Representatives.

Keywords: capability, information communication technology, DPR RI, modern parlement

PENDAHULUAN

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan Setjen DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi dari DPR RI. Setjen DPR RI adalah pilar demokrasi melalui kedudukannya sebagai unsur penunjang DPR yang akan mendukung bagi proses *checks and balances* antara DPR RI dengan Pemerintah. Saat ini, Setjen DPR RI memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan segala pelayanan kepada anggota mulai dari administrasi, keahlian, dan hal-hal lain yang bersifat teknis.

Pengaruh sistem Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di sektor publik telah membuat beberapa organisasi pemerintah meningkatkan fungsinya sesuai dengan kebutuhan warga dan juga untuk meningkatkan penyampaian layanan, meningkatkan produktivitas, dan efektifitas. TIK merupakan sesuatu hal penting bagi layanan publik, khususnya lembaga pemerintahan yang mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan layanannya (Layne & Lee, 2001).

Potensi pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya terwujud, lembaga-lembaga pemerintahan masih tertinggal dalam mengembangkan pendekatan digital yang membahas layanan secara lengkap dan diberikan tepat waktu. DPR RI/Parlemen haruslah dapat menjadi lembaga yang terbuka dan dapat diakses dengan menggunakan TIK untuk mengelola dan berbagi pengetahuan dan informasi, mengembangkan keterlibatan publik dalam mengatasi krisis legitimasi atas warga negara yang merasa tidak pernah diperhatikan, kecewa dengan politik, dan tidak percaya pada kinerja dan perilaku demokratis anggota perwakilan mereka. (Coleman & Spiller, 2003; Leston-Bandeira, 2014). Parlemen harus

berkontribusi untuk membangun demokrasi berkelanjutan berdasarkan kewarganegaraan yang efektif dalam hal partisipasi dan kontribusi warga dalam proses kebijakan sebagai hasil dari berbagi pengetahuan dan dialog (Denhardt & Denhardt, 2001; Geczi, 2007).

Salah satu resolusi tahun 2019 DPR RI adalah meningkatkan upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan perwujudan *Open Parliament* dan Parlemen Modern. Desain parlemen modern awalnya diperkenalkan pada tahun 1997 yaitu pada Konferensi Uni Eropa mengenai "*The Future Democracy: Transition and Challenge in European Governanve*". Konferensi tersebut membahas mengenai perubahan-perubahan sosial masyarakat yang terjadi dan mendiskusikan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan.

Penyebab terjadinya perubahan adalah kondisi lingkungan internasional yang dipengaruhi oleh globalisasi, transnasionalisasi, dan regionalisasi. Melihat kondisi ini maka peran teknologi komunikasi dan informasi digital sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di era globalisasi, khususnya yang harus dihadapi oleh parlemen. Perkembangan keterbukaan informasi terus berlanjut hingga tahun 2012 dengan dilaksanakannya *Declaration on Parliamentary Openness*.

Saat ini konsep parlemen modern telah diadopsi oleh beberapa negara seperti Inggris, Afrika Selatan, dan Indonesia. Kepercayaan publik tentunya ditentukan oleh tingkat pengetahuan publik mengenai sistem politik demokrasi. Ketidakpercayaan publik terhadap parlemen dan ketidakpahaman publik mengenai sistem politik demokrasi dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik. Dengan adanya parlemen modern, maka diharapkan

kepercayaan publik terhadap parlemen akan kembali.

Guna mendukung DPR RI mewujudkan parlemen modern, Setjen DPR RI dituntut untuk mempercepat proses kerja serta modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan TIK. Teknologi adalah prasyarat utama untuk inovasi ataupun melakukan perubahan organisasi, tetapi seperti yang diterima secara umum, strategi memiliki peran yang menentukan dalam transformasi digital (Berghaus & Beck, 2016).

Isu yang seringkali muncul adalah meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat kurang disadari oleh DPR RI, aktifitas anggota dewan masih lebih banyak dilakukan secara tatap muka serta belum memanfaatkan TIK. DPR RI memiliki resolusi kedepan agar lebih dekat dengan masyarakat dan menjadi parlemen modern. Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung anggota Dewan dituntut untuk memodernisasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Sesuai dengan misinya, Setjen DPR RI berupaya maksimal mengembangkan tata kelola berbasis TIK yang baik dalam proses bisnis internal organisasi dengan mengikuti perkembangan teknologi, kolaborasi dengan *start-up* berbasis teknologi potensial, dan peningkatan infrastruktur TIK. Teknologi informasi dan komunikasi mendorong parlemen sebagai lembaga yang responsif untuk menyediakan dokumen dan informasi untuk dilihat dan dibahas oleh warga negara dalam rangka meningkatkan proses internal dan mengembangkan inisiatif e-partisipasi untuk membangun e-parlemen atau DPR RI modern. Infrastruktur teknologi informasi diperlukan untuk mengelola informasi, memastikan keterbukaan dan transparansi, memulihkan citra anggota dewan dengan warga, membangun sumber berbagi pengetahuan dan penciptaan dengan mengembangkan inisiatif e-partisipasi dan alat-alat (Romanelli, 2016).

Kapabilitas pada dasarnya menggambarkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya, baik berwujud (*tangible*) maupun nirwujud (*intangible*) untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Kapabilitas akan ada apabila sumber daya itu telah dapat diintegrasikan sesuai tujuannya, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, atau sejumlah tugas yang diharapkan. Kapabilitas menunjukkan kemampuan organisasi untuk memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber dayanya (Assauri, 2013).

Kapabilitas Teknologi Informasi Komunikasi dan Teknologi Zhang et al., (2008)

mendefinisikan kemampuan TIK sebagai kemampuan perusahaan untuk memobilisasi dan menyebarkan sumber daya berdasarkan teknologi informasi dalam kombinasi atau penggabungan dengan sumber daya dan kemampuan-kemampuan lain. Kapabilitas TIK berfokus pada 3 elemen yaitu infrastruktur TIK, Operasi TIK dan Pengetahuan TIK, sehingga Kapabilitas Teknologi Informasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memilih, menerima, mengkonfigurasi dan menerapkan teknologi informasi (Chakravarty et al., 2013).

Menurut studi Pérez-López dan Alegre (2012), kapabilitas TIK dilihat sebagai konstruk yang terdiri dari tiga ukuran, yaitu: Pengetahuan TIK adalah tingkat kesadaran akan manfaat dari TIK dan bagaimana organisasi memberdayakan pengetahuan dan ketrampilan TIK bagi karyawan, yang kedua adalah operasi TIK terkait dengan tingkat penggunaan TIK dalam kegiatan organisasi, atau transformasi kegiatan untuk meningkatkan penggunaan TIK, serta yang ketiga adalah infrastruktur TIK meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan staf pendukung, atau alat dan sumber daya yang berkontribusi pada akuisisi, pemrosesan, penyimpanan, penyebaran dan penggunaan informasi.

Banyak organisasi memanfaatkan kemampuan TIK sebagai sumber daya berharga dan tak ada bandingannya yang membantu organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Luftman, Lyytinen & Zvi, 2017; Mikalef & Pateli, 2017; Queiroz, Tallon, Sharma & Coltman, 2018). Kapabilitas TIK yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan Setjen DPR RI dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan TIK sebagai suatu alat untuk memaksimalkan peran Setjen sebagai sistem pendukung kinerja anggota DPR RI menuju modernisasi parlemen. Modernisasi Parlemen didefinisikan sebagai keterbukaan dan akuntabilitas parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam rangka memperkuat tata pemerintahan yang demokratis. Hal ini akan terwujud dengan mengoptimalkan kapabilitas TIK.

Penelitian ini dilakukan karena minimnya penelitian mengenai Kapabilitas Teknologi Informasi di DPR RI, sedangkan hal tersebut diperlukan dalam mewujudkan DPR RI modern. Azed (2014) dalam penelitiannya menyoroti kinerja legislasi DPR RI menyampaikan bahwa DPR melaksanakan amanat rakyat antara lain melalui fungsi legislasi, yakni membentuk UU dengan kesepakatan bersama Presiden. Harapan

rakyat kurang dipenuhi secara optimal oleh DPR disebabkan kinerja parlemen di bidang legislasi yang kurang memuaskan karena tidak memenuhi target Prolegnas yang dibuatnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan fungsi-fungsi DPR sebagai parlemen kurang maksimal dalam mendorong kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Untuk itu penting dilakukan serangkaian kebijakan dan langkah konkret guna meminimalisir permasalahan yang membelit parlemen sekaligus mendorong peningkatan kinerja DPR dalam fungsi legislasi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam kinerjanya meliputi; legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kinerja DPR RI periode 2014-2019 dalam 1 (satu) tahun awal periode, dibidang legislasi menghasilkan 3 (tiga) produk Undang-undang dari 39 prioritas RUU, dibidang anggaran menghasilkan perencanaan APBN, dan rencana rumah aspirasi, kenaikan dana reses, kenaikan dana tunjangan, pembangunan gedung DPR, pembangunan perpustakaan DPR. Sedangkan dibidang pengawasan membentuk rapat-rapat, kunjungan kerja, pembentukan tim dan panitia kerja, pemberian pertimbangan dan persetujuan atas usulan peningkatan pejabat publik. Kinerja DPR tersebut ternyata sangat memprihatinkan, terburuk selama reformasi (10 tahun), dianalisis dari minimnya produk undang-undang, penganggaran yang lebih cenderung mengakomodir kepentingan individu dan kelompok dan pengawasan yang lebih. Buruknya kinerja DPR berdampak pada kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik pada DPR RI berada diangka 47-52 persen, terendah dari pada lembaga-lembaga kekuasaan lainnya (Rasaili, 2019).

Furkon et al. (2012) yang tergabung dalam *The Habibie Center* (THC) melakukan penelitian mengenai "Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-undang. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan fungsi legislasi DPR dalam mengatasi kelambanan proses pembentukan RUU menjadi UU. Dari hasil temuan penelitian kebijakan ini, tim peneliti menemukan bahwa permasalahan yang seringkali terjadi adalah proses perencanaan yang kurang matang dengan ketiadaan naskah akademik saat pengajuan RUU tertentu. Dalam tahapan pembahasan, tim peneliti melihat adanya rangkap jabatan yang dimiliki anggota Baleg Dengan demikian menimbulkan hambatan dalam hal penjadwalan rapat. Lebih lanjut, kurang optimalnya dukungan Tenaga Ahli terutama dalam hal legislative drafting. Terakhir, temuan hasil penelitian ini menyoroti

permasalahan kedisiplinan anggota DPR dan persoalan uji publik yang memakan waktu cukup lama. Dari beberapa hasil temuan penelitian kebijakan ini, tim peneliti merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan solusi bagi pemangku kebijakan untuk berkontribusi dalam perbaikan kinerja DPR ke depan.

Rudhiawan (2015) mengkaji mengenai peran humas Setjen DPRI RI dalam mengelola citra positif DPR RI di mata publik. Dimana dalam penelitian tersebut diketahui bahwa peran humas Setjen DPRI masih belum maksimal dikarenakan kekurangan SDM dalam segi kualitas, sehingga terdapat hambatan yang dirasakan. Upaya yang dilakukan oleh Setjen DPR RI dalam meningkatkan citra baik DPR RI dengan cara memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Terdapat dua faktor yang harus diperhatikan agar masyarakat memahami citra baik yang ingin ditampilkan oleh DPR RI sebagai lembaga pemerintahan yaitu, faktor kualitas dimana harus adanya peningkatan kualitas SDM yang memahami tentang pemerintahan, selain itu faktor kuantitas dimana perlunya penambahan personil dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang datang tidak sebanding dengan SDM yang menanganinya sehingga kinerja penyampaian informasi belum maksimal.

Mengacu pada dinamika penyelenggaraan TIK di lingkungan Setjen DPR RI dan upaya modernisasi parlemen Indonesia, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kapabilitas TIK pada Setjen DPR RI.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung pada Sekretariat Jendral DPR RI. Menurut Riduwan (2015) observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan survey atau observasi langsung, dimana peneliti turut ambil bagian bersama objek yang diteliti, yaitu mengamati langsung bagaimana kapabilitas Teknologi Informasi Setjen dalam mendukung DPR RI yang modern. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui: a) observasi; b) kuesioner; dan, c) wawancara mendalam. Metode wawancara mendalam yang

dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara mendalam dilakukan kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Wawancara mendalam yang dilakukan kepada 2 (dua) Kepala pusat, karena mereka memiliki pemahaman dan kewenangan terhadap kapabilitas TIK dan sumber daya manusia di Setjen DPR RI.

Metode analisis data dalam pengolahan kuisisioner menggunakan indeks penilaian skala likert. Penilaian Kapabilitas TIK yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat kondisi infrastruktur TIK. Kuisisioner yang diberikan kepada 82 (delapan puluh dua) responden menggunakan tingkat persetujuan skala likert terdiri dari 5 (lima) pilihan skala yang mempunyai gradasi sebagai berikut (1) Sangat Setuju (SS); (2) Setuju (S); (3) Netral (N), (4) Tidak Setuju (TS); (5) Sangat Tidak Setuju (STS).

Jawaban-jawaban dari Responden tersebut dapat diberi bobot nilai yaitu:

1. SS = Sangat Setuju, diberi nilai 5
2. S = Setuju, diberi nilai 4
3. N = Netral, diberi nilai 3
4. TS = Tidak Setuju, diberi nilai 2
5. STS = Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1

Total skor penilaian diperoleh dengan menjumlahkan semua skor dari setiap pernyataan yang telah dihitung skornya menggunakan formula (Bobot nilai x Jumlah Responden)

Skor Maksimum= jumlah responden x skor tertinggi likert (5)

Skor Minimum= jumlah responden x skor terendah likert (1)

Indeks Penilaian (%)= $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$

Interval hasil dari indeks penilaian adalah sebagai berikut:

Indeks 0% - 19,99% : Sangat Tidak Setuju

Indeks 20% - 39,99% : Tidak Setuju

Indeks 40% - 59,99% : Ragu-ragu

Indeks 60% - 79,99% : Setuju

Indeks 80% - 100% : Sangat Setuju

Hasil yang menunjukkan Interval Indeks penilaian diatas 60% menyatakan bahwa infrastruktur TIK Setjen DPR RI sudah baik. Sebaliknya jika dibawah 40% menunjukkan infrastruktur TIK buruk.

Objek penelitian adalah sekretariat jendral DPR RI. Data dikumpulkan pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Profil responden berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan unit kerja, usia, lama bekerja, dan latar belakang pendidikan. Profil tersebut akan

dianalisis secara deskriptif untuk melihat sebaran pegawai dan karakteristik. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi (RITIK) Setjen dan BK DPR RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden. Profil responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan lama bekerja dianalisis secara deskriptif untuk melihat sebaran pegawai dan karakteristik. Hasil penelitian profil responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan laki-laki dengan presentase sebanyak 58% dan responden perempuan sebanyak 32%. Namun ada juga responden yang tidak melakukan pengisian yaitu sebanyak 10%. Sebagian besar responden berada di rentang usia lebih dari 50 tahun yaitu sebesar 57%, antara usia 46 hingga 50 tahun sebesar 33%, antara usia antara 36 tahun hingga 40 tahun sebesar 40%.

Artinya pada rentang usia lebih dari 50 tahun pegawai lebih memahami mengenai visi dan misi Setjen DPR RI, budaya, perubahan platform cara kerja dan sistem penialaian, SDM, infrastruktur, dan iklim Setjen DPR RI. Selanjutnya, hasil penelitian profil responden menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Setjen DPR RI telah bekerja selama lebih dari 15 tahun yaitu sekitar 90%, sedangkan sebanyak 5% tidak menjawab. Hasil lengkap profil responden disajikan pada tabel 1.

Kapabilitas Teknologi Informasi Setjen DPR RI. Amanat terhadap penerapan tata kelola dan infrastruktur TIK telah dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian yang sesuai dengan sararan program pada Renstra Setjen tahun 2016-2019, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal. Oleh karena itu, Setjen DPR RI terus berupaya memaksimalkan pengembangan tata kelola berbasis TIK yang menyeluruh dan terpadu melalui kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem TIK di lingkungan Setjen yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Dukungan teknis pada ketersediaan layanan jaringan komputer yang handal di lingkungan DPR RI merupakan isu yang sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak dan berkembangnya aplikasi-aplikasi pada unit kerja sehingga peranan jaringan komputer yang handal tidak dapat dipungkiri. Tanpa jaringan komputer, proses kegiatan operasional dan layanan akses informasi akan terhenti dan dapat menghambat kinerja Anggota DPR RI.

Tabel 1. Profil responden dilihat berdasarkan jenis kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Persen
1	Jenis Kelamin		
	Perempuan	26	31,71%
	Laki-laki	48	58,53%
	Tidak menjawab	8	9,76%
2	Usia		
	Usia 36-40 Tahun	3	4%
	Usia 41-45 tahun	2	2%
	Usia 46-50 Tahun	27	33%
	Usia > 50 Tahun	47	57%
	Tidak menjawab	3	4%
3	Lama Bekerja		
	Antara 1 – 5 tahun	2	2%
	Antara 11 – 15 tahun	2	2%
	Lebih dari 15 tahun	74	90%
	Tidak menjawab	4	5%

Sumber: Data penelitian (2019)

Oleh sebab itu, diperlukan strategi pembangunan infrastruktur yang adaptif, pengelolaan keamanan jaringan, dan koneksi jaringan internet yang handal sehingga mampu mengakomodasi pengguna teknologi informasi di lingkungan DPR RI.

Konektivitas jaringan internet yang disediakan saat ini memiliki dua jenis akses yaitu melalui layanan jaringan kabel dan nirkabel (wireless) yang berada di seluruh ruang kerja anggota, ruang rapat, dan ruang unit kerja Setjen dan BK di lingkungan gedung DPR RI. Konektivitas jaringan internet tersebut diakses menggunakan perangkat komputer maupun mobile seperti notebook, tablet, dan smartphone.

Secara umum layanan jaringan internet telah tersebar disembarang gedung utama di dalam kompleks perkantoran DPR RI Senayan dan tiga lokasi di luar perkantoran yakni Griya Sabha Kopo, Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata, dan Ulujami. Bandwith internet yang tersedia yaitu sebesar 3 GB pada tahun 2019 dengan jumlah akses mencapai delapan ribu pengguna aktif. Pengelolaan jaringan internet dan perangkat servernya dilakukan secara terpadu dalam satu ruang server yang berlokasi di Gedung Nusantara 1 lantai 3 dengan monitoring online selama 24 jam setiap harinya oleh SDM Pranata Komputer.

Terkait dengan implementasi dan Disaster Recovery Center (DRC), Setjen DPR RI telah menerapkan layanan *collocation* dengan penyedia jasa yang telah memiliki sertifikasi ISO 27001 sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. *Collocation* adalah tempat atau rak untuk menempatkan atau meletakkan server dalam sebuah pusat data yang merupakan milik *third party* yang tidak dikelola sendiri oleh Setjen dan BK DPR RI.

Beberapa aplikasi bersifat mandatory yang ditempatkan dalam *collocation* tersebut dan bertujuan untuk menjaga ketersediaannya agar tetap dapat diakses dalam kondisi apapun, terlebih saat jaringan di dalam lingkungan DPR RI sedang down. Aplikasi-aplikasi penting tersebut antara lain yaitu Email DPR, LPSE DPR, Cloud DPR, Active Directory, dan Aplikasi Simfoni (data sharing komisi 6). Sementara itu, beberapa aplikasi lainnya masih berada di ruang server internal Setjen dan BK DPR RI, karena masih dalam status pengembangan aktif oleh programmer.

Sistem informasi dan aplikasi TIK yang telah dikembangkan dapat dilihat pada gambar 1. Sistem dan aplikasi TIK dikelompokkan kedalam 2 kategori, yakni kategori aplikasi yang digunakan oleh masyarakat dan Anggota Dewan yang disebut SIGOTA dan kategori aplikasi yang digunakan oleh pegawai dan unit kerja Setjen dan BK yaitu SIAP untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sehari-hari sebagai bentuk otomatisasi dan modernisasi administrasi perkantoran. Sistem informasi dan aplikasi tersebut secara garis besar meliputi website utama DPR RI, sub website unit kerja Eselon II, sistem informasi legislasi, sistem administrasi kepegawaian, sistem administrasi keuangan, sistem administrasi perencanaan, sistem data penelitian, sistem pendidikan dan pelatihan.

Pada tahun 2017, pengembangan aplikasi yang dilakukan adalah pemenuhan terhadap pembangunan website untuk eselon II, sedangkan pada tahun 2018 adalah mengintegrasikan website unit eselon II, dan pembangunan aplikasi berbasis mobile. Jumlah aplikasi yang telah diterapkan di seluruh unit kerja Eselon II sebagai bentuk tata kelola berbasis TIK tahun 2018 mengalami penambahan sebanyak 72 aplikasi. Pengembangan ini berupa aplikasi baru yang

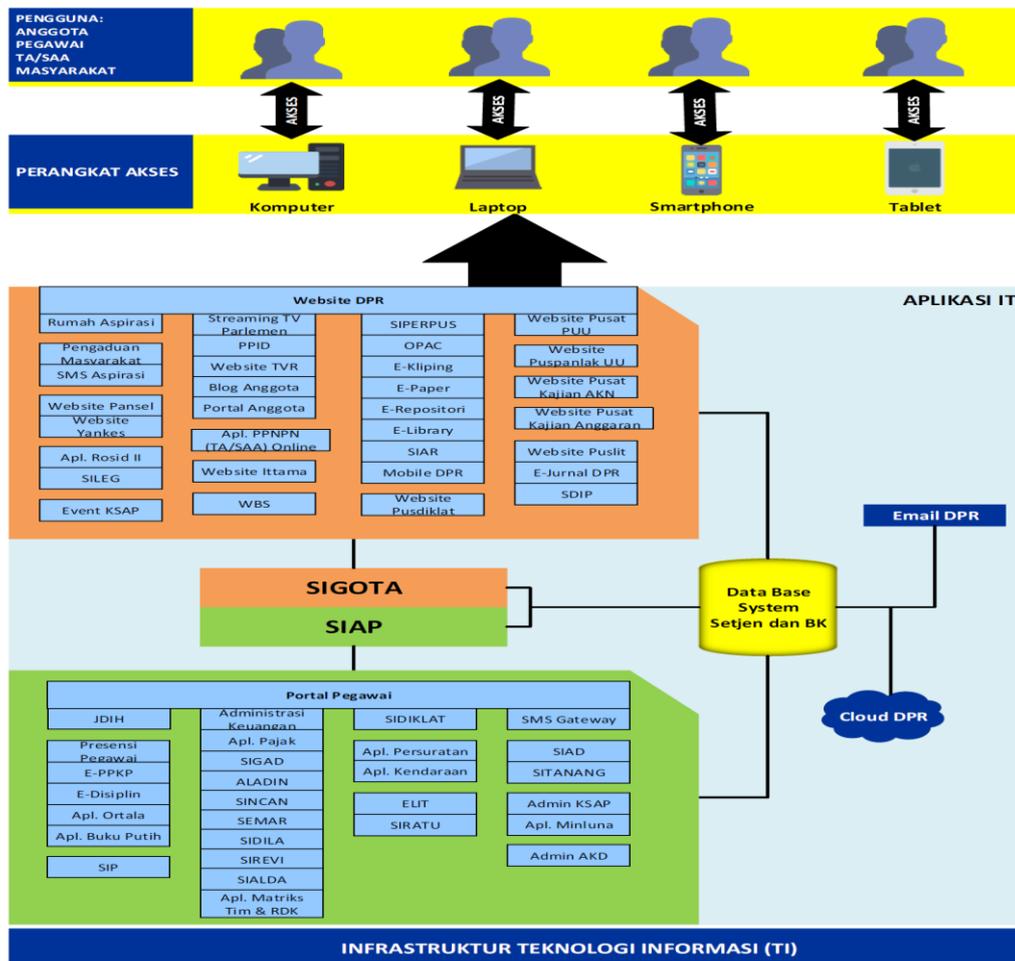
dapat diakses oleh masyarakat untuk mendukung penyampaian informasi proses legislasi mewujudkan pembentukan UU yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien, dan efektif.

Selain itu, Setjen DPR RI juga membentuk aplikasi *Cloud DPR* untuk anggota dan pegawai Setjen dan BK DPR RI yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan *online* sehingga dapat dilakukan aktivitas berbagi *file* ataupun dokumen tanpa dibatasi oleh penyimpanan tempat dan waktu. Pada tahun 2018, Setjen DPR RI mengembangkan aplikasi DPR e-Library yang mengikuti perkembangan tren aplikasi berbasis mobile untuk diakses pada gawai Android dan IOS, yakni sebuah aplikasi perpustakaan dalam genggaman bagi pengguna untuk membaca dan meminjam koleksi pustaka dalam bentuk digital. Adapun arsitektur aplikasi Setjen dan BK DPR RI pada Gambar 1.

Prinsip pengembangan TIK. Akses terhadap aplikasi dapat dilakukan melalui portal intranet (<https://portal.dpr.go.id/login>) atau *website* publik salah satunya untuk layanan informasi

yaitu <http://ppid.dpr.go.id/>. Aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan bagi kebutuhan internal unit kerja Setjen dapat diakses melalui portal intranet dengan konsep *Single Sign On* (SSO), dimana pengguna hanya harus melakukan sekali login dan kemudian mendapatkan akses sesuai peran dan hak aksesnya yang telah diatur di dalam sistem.

Gambar 1. dijadikan dasar dalam penerapan tata kelola berbasis TIK yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan TIK. Akses aplikasi maupun *website* yang diperuntukkan bagi masyarakat secara luas dapat diakses melalui jaringan internet seperti *website* utama DPR RI <http://www.dpr.go.id/> dan *website* untuk informasi legislasi dan layanan informasi publik. Seluruh aplikasi ini terintegrasi pada dua aplikasi utama yakni SIGOTA yang mengelola administrasi data Anggota Dewan dan SIAP yang mengelola administrasi data Pegawai Setjen. Kumpulan data-data tersebut pada akhirnya akan bermuara pada sebuah pangkalan data organisasi yaitu *Database System* Setjen DPR RI.



Gambar 1. Arsitektur Aplikasi TIK Setjen DPR RI
Sumber: Pusat Data dan Informasi Setjen DPR RI (2019)

Guna mendukung tugas DPR RI, Setjen DPR RI melakukan dukungan di bidang data dan informasi, yaitu: 1) Perpustakaan, Pengembangan website perpustakaan diintegrasikan dengan website SLIMS (Senayan Library Management System) dengan aplikasi-aplikasi perpustakaan yang lainnya seperti katalog OPAC, Repositori, e-Kliping, e-Paper, DPR e-Lib, dan e-Jurnal dalam kemasan website yang lebih besar yakni www.perpustakaan.dpr.go.id sehingga dapat dijadikan sebagai portal pencarian bahan pustaka yang terpusat; 2) Pengolahan data dan teknologi informasi, Setjen DPR RI memiliki tugas dalam layanan pengembangan aplikasi dengan meluncurkan website resmi bagi DPR RI dengan domain www.dpr.go.id, menyediakan email resmi bagi anggota dewan dan pegawai Setjen DPR RI dengan domain @dpr.go.id, meluncurkan aplikasi kepegawaian dimana aplikasi ini berisi data mengenai pegawai Setjen DPR RI, meluncurkan aplikasi anggota DPR RI, aplikasi tenaga ahli dan asisten anggota, aplikasi portal sebagai fasilitas gerbang untuk masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Setjen DPR RI untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, dan menyediakan keamanan aplikasi dengan menggunakan layanan single sign on, yaitu sebuah fasilitas otentikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi/sistem informasi yang akan digunakan selanjutnya; 3) Pengarsipan dan museum, dukungan Setjen DPR RI dalam pengarsipan dan museum mencakup menerima arsip/dokumen dari semua unit-unit kerja di Sekretariat Jendral DPR-RI sesuai jadwal Retensi Arsip yang telah ditentukan, melakukan pengolahan arsip/dokumen, melakukan pemilahan arsip media baru sesuai dengan jenis arsipnya, memberikan pelayanan data dan informasi kepada pengguna informasi yang bersumber pada arsip/dokumen, melakukan perawatan arsip/dokumen secara berkala agar fisik dan informasi arsip/dokumen dapat terpelihara dengan baik, serta melakukan pengadaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan museum; 4) Risalah rapat, tugas Setjen DPR RI dalam layanan bidang risalah adalah melakukan perekaman rapat, pencatatan rapat, mentranskrip rekaman rapat, mengedit hasil transkrip dan menyusunnya ke dalam bentuk risalah, serta mencetak, memperbanyak, dan mendistribusi (*hardcopy dan softcopy*) risalah rapat paripurna ke seluruh anggota DPR RI.

Setjen DPR RI melalui Reformasi Birokrasi terus berbenah diri dalam mendukung terwujudnya DPR RI modern yang menjalankan

fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR yang membawa aspirasi publik. Dimana DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik, kemudahan akses, terbuka, dan transparan. Selain itu, DPR juga mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menjangkau publik secara lebih luas melalui digitalisasi.

Perkembangan teknologi saat ini yang telah diadopsi oleh Setjen dan BK DPR RI untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi TIK dijelaskan seperti berikut ini.

Pertama, Aplikasi berbasis mobile. Tren teknologi informasi dan sistem informasi yang berkembang saat ini merupakan faktor eksternal yang memengaruhi pengembangan sistem informasi di lingkungan DPR RI. Pergeseran kecenderungan mengakses internet dari *personal computer* ke *smartphone*, perlu dijadikan acuan dalam pengembangan berbagai sistem informasi. Sistem informasi di lingkungan DPR harus dapat diakses secara mobile.

Menurut *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dalam Report tahun 2012, negara berkembang menyumbang hingga delapan puluh persen langganan seluler secara mobile yang menyebabkan masyarakat semakin aktif dalam aktivitas politik. IPU juga mencatat dalam *World e-Parliament Report* tahun 2016 bahwa penggunaan media *World e-Parliament* sosial yang meningkat dibandingkan dengan televisi menjadi salah satu alasan mengapa diperlukan aplikasi berbasis mobile untuk menjangkau masyarakat secara lebih mudah dan luas. Tren teknologi ini akan memberikan sebuah nilai lebih dalam layanan *e-Parliament* di lingkungan DPR RI sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Kedua, Interoperabilitas dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Parlemen negara lain. Teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah yang lain dan lembaga parlemen negara-negara maju juga menjadi faktor eksternal pengembangan sistem informasi di Setjen DPR RI dan terlibatnya DPR RI dalam konferensi *World e-Parliament International* untuk membuka wawasan mengenai implementasi TIK dalam parlemen, mengingat diperlukan adanya interoperabilitas dengan instansi Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan secara politik dengan DPR RI dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan.

Terkait kelengkapan produk hukum seperti RUU dan UU, Setjen DPR RI memiliki keterkaitan dengan K/L yang merupakan pelaksana operasional produk hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. Adanya integrasi antara Setjen DPR RI dengan instansi-instansi terkait akan

memengaruhi pengembangan sistem informasi baik sistem yang sudah ada maupun sistem informasi yang akan dikembangkan.

Ketiga, Big Data dan Open Data Legislasi. *Big Data* merupakan pengembangan dari pengelolaan data tradisional yang dahulu sangat bergantung kepada basis data relasional. *Big Data* diperkenalkan sebagai sistem teknologi untuk menanggulangi ledakan informasi seiring semakin bertumbuhnya volume dan jenis data yang beredar di dunia maya (Kubick, 2012).

Big Data dapat diasumsikan sebagai sebuah media penyimpanan data yang menawarkan ruang tak terbatas serta kemampuan untuk mengakomodasi dan memproses berbagai jenis data dengan sangat cepat. *Open Data* (OD) adalah data yang memiliki kaidah “terbuka”, dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat kecuali dengan mengutip sumber pemilik data. Dengan adanya implementasi *Big Data* dan *Open Data* legislasi pada Parlemen Modern, maka fokus penyediaan informasi publik terkait data legislasi dan kegiatan parlemen dapat ditingkatkan.

Seluruh kumpulan data yang ada tersebut kemudian dikategorikan sebagai domain publik yang tidak diperkenankan mengandung informasi yang berisi rahasia negara, rahasia pribadi atau hal-hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keempat, Cloud Environment. Pengembangan *Cloud Environment* dengan konsep *service on demand* pada infrastruktur terpusat merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan akan integrasi dan interoperabilitas yang lebih tinggi bagi layanan TIK DPR RI yang mampu menjembatani berbagai platform aplikasi yang berbeda. *Cloud Environment* juga memiliki biaya yang lebih rendah sehingga bersahabat dengan finansial suatu parlemen khususnya di negara berkembang yang biasanya memiliki dukungan finansial yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Pemanfaatan teknologi ini dibutuhkan dalam organisasi agar suatu organisasi dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan organisasinya.

Setjen DPR RI telah melaksanakan pembahasan dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi terkait rencana penambahan menu pada aplikasi ortala. Jika pada saat ini sistem informasi ortala berisi menu terkait organisasi yaitu tentang jabatan dalam hal ini, nama jabatan, kelas jabatan, dan rincian tugas jabatan yang ketiganya ini telah terintegrasi dengan Bagian Kepegawaian dan terkait tata laksana yaitu tentang SOP.

Pengembangan ke depan atas aplikasi ortala adalah adanya akses bagi masing-masing pegawai untuk melihat semua produk bagian organisasi dan tata laksana sehingga diharapkan dengan terbukanya akses ini, bagian ortala dapat menerima umpan balik atas output yang telah dihasilkan.

Penerapan Teknologi. Setjen DPR RI telah menyusun rencana aksi kegiatan pengembangan aplikasi yang dilakukan selama tahun 2018 yang terdapat pada RITIK, dijelaskan seperti berikut ini.

Pertama, Pembangunan aplikasi arsip dan museum. Pembangunan aplikasi arsip dan museum merupakan sub kegiatan lanjutan dari RB tahun 2017 yang telah selesai hingga 80% untuk pembuatan menu Personal Files dan dilanjutkan pada tahun 2018. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah berhasil diselesaikan dengan menambahkan menu Personal Files untuk Anggota Dewan, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan Pegawai Setjen dan BK DPR RI. Selain itu pengembangan juga dilakukan dengan menambahkan menu tempat penyimpanan dokumen. Menu baru ini memiliki fungsi untuk menginput informasi tempat/lokasi penyimpanan fisik dokumen di dalam Depo Arsip. Pengembangan aplikasi arsip dan museum dalam hal isi atau konten (file, audio, video).

Berdasarkan Roadmap RB tahun 2015-2019, sub kegiatan pengembangan aplikasi arsip dan museum (e-arsip) dilaksanakan di tahun 2017 dan 2018. Deskripsi kegiatan ini yaitu menyediakan fungsi pada aplikasi untuk melakukan penyimpanan variasi konten/isi yakni berupa file video. Pelaksanaannya telah berhasil diselesaikan di tahun 2017 dengan menambah menu pada aplikasi arsip dan museum untuk menyimpan variasi konten berupa dokumen teks digital dalam bentuk PDF, audio, dan foto.

Berbeda dengan sub kegiatan sebelumnya, pengembangan website perpustakaan yang diintegrasikan dengan SLIMS merupakan sub kegiatan baru yang dilaksanakan pada Rencana Aksi 2018. Pengembangan ini telah berhasil dilakukan yakni dengan mengintegrasikan website SLIMS (Senayan Library Management System) dengan aplikasi-aplikasi perpustakaan yang lainnya seperti katalog OPAC, Repositori, e-Kliping, e-Paper, DPR e-Lib, dan e-Jurnal dalam kemasan website yang lebih besar yakni www.perpustakaan.dpr.go.id sehingga dapat dijadikan sebagai portal pencarian bahan pustaka yang terpusat.

Kedua, Pembangunan manajemen kearsipan berbasis TIK. Sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi pada Manajemen Kearsipan

Berbasis TIK, telah dilaksanakan proses alih media dokumen legislasi, dokumen Peraturan DPR RI, Risalah Paripurna, dan telah di entry ke dalam aplikasi Armus. Daftar kesediaan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat melalui aplikasi PPID dan website DPR RI.

Selain telah mengembangkan berbagai aplikasi, Setjen DPR RI juga diperkuat dengan disusunya Surat Keputusan Sekertaris Jendral DPR RI untuk penetapan penggunaan aplikasi. Terkait dengan perangkat suprastruktur untuk memperkuat kebijakan dan tata kelola TIK, DPR RI telah memiliki Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:15/BURT/DPR RI/11/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada tahun 2009 juga telah disusun standar pelayanan pembangunan dan pengembangan aplikasi, standar pelayanan pengelolaan jaringan internet, konsep kebijakan dan standar penggunaan akun dan kata sandi, surat elektronik, dan internet di lingkungan Sekjen DPR RI. Selain itu, terdapat juga konsep pedoman alih media dokumen sebagai panduan bagi unit kerja pencipta arsip dan unit kerja pengelola arspi dalam proses melakukan alih media.

Pada tahun 2017 pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Setjen DPR RI adalah pemenuhan terhadap pembangunan website untuk eselon II, sedangkan di tahun 2018 adalah mengintegrasikan website unit eselon II, dan pembangunan aplikasi mobile. Tabel 2

menunjukkan pengembangan penerapan tata kelola berbasis TIK. Penambahan aplikasi dari tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) aplikasi yang merupakan tambahan aplikasi untuk mengintegrasikan aplikasi sebelumnya dan membuat aplikasi *mobile* berdampak semakin teritegrasinya aplikasi yang ada didalam unit kerja. Integrasi yang terjadi antar unit kerja juga mendukung kemudahan penyampaian akses informasi ke masyarakat. Kemudahan akses informasi kepada masyarakat merupakan prasyarat mutlak parlemen modern yang identik dengan keterbukaan.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa tata kelola berbasis TIK di tahun 2018 telah mengalami penambahan yakni sebesar 72 aplikasi. Pengembangan ini berupa aplikasi baru yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendukung penyampaian informasi proses legislasi mewujudkan pembentuk UU yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien, dan efektif.

Pada saat ini jumlah aplikasi yang telah dikembangkan secara swakelola telah mencapai 89 aplikasi, dilakukan berdasarkan pada segmentasi penggunaanya, dimana terdiri atas empat klasifikasi, antara lain: 1) Anggota DPR RI, yaitu aplikasi khusus yang ditujukan untuk mendukung kinerja Anggota Dewan terhadap akses layanan data dan informasi; 2) Setjen DPR RI, yaitu aplikasi yang khusus ditujukan bagi pegawai Sekretariat Jendral untuk mendukung kinerjanya sehari-hari; 3) Publik/ masyarakat, aplikasi yang ditujukan secara umum bagi masyarakat luas dan menjadi identitas serta gerbang informasi mengenai DPR RI; dan, 4) Event/ acara tertentu, aplikasi yang dibangun sebagai media informasi terhadap acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh DPR RI.

Tabel 2. Pengembangan penerapan tata kelola berbasis TIK

Tahun	Jumlah Unit Kerja	Jumlah Aplikasi	Keterangan
2017	20	69	Melakukan pengembangan <i>website</i> unit kerja eselon II terutama pada Badan Keahlian DPR RI dan pengembangan aplikasi untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan pimpinan dalam rangka mendukung akselerasi pengelolaan sistem informasi untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja
2018	20	72	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengintegrasian antara <i>website</i> unit kerja eselon II dengan aplikasi-aplikasi yang ada di unit kerja sehingga dapat diakses oleh masyarakat untuk mendukung penyampaian informasi Melakukan pembaharuan beberapa aplikasi dalam tampilan antarmuka baru yang lebih menarik. Pada tahun 2018, Setjen DPR RI mengembangkan aplikasi yang mengikuti tren aplikasi berbasis <i>mobile</i> untuk dapat diakses pada gawai Android dan IOS

Sumber: Data diolah (2020)

Tabel 3. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Setjen DPR RI

No.	Pernyataan	Tanggapan Jawaban					Indeks Penilaian
		STS	TS	N	S	SS	
1	Sarana komunikasi yang modern berbasis digital memudahkan pegawai mencapai kinerja yang optimal di Setjen DPR RI	0	0	4	53	25	85.1
2	Perubahan Tata Ruang kantor membuat kenyamanan bagi pegawai yang bekerja	0	0	7	54	21	83.4
3	Adanya perangkat computer <i>online</i> yang memudahkan pegawai untuk melihat keadaan lingkungan Setjen DPR RI	0	0	4	54	24	84.9
4	Adanya media komunikasi internal, baik formal maupun informal yang memadai untuk memastikan pegawai Setjen berkomunikasi dengan baik satu sama lain	0	1	2	61	18	83.4
5	Perekrutan pegawai yang dilakukan oleh setjen sudah menggunakan teknologi digital	0	2	7	48	25	83.4
6	Dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk mendukung proses digitalisasi.	0	0	2	59	21	84.6
7	Setjen DPR RI selalu melakukan inovasi terhadap sistem informasi dan aplikasi TIK yang terkini.	0	3	10	52	17	80.2
8	Fasilitas kantor yang diberikan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini.	0	5	16	50	11	76.3
9	Semakin baik tingkat pengetahuan yang dimiliki pegawai akan membantu untuk melakukan perubahan lebih baik	0	0	5	51	26	85.1
10	Melakukan evaluasi secara bertahap dan mengatasi masalah dengan baik	0	1	8	53	20	82.4

Sumber: Data diolah (2020)

Penilaian Kapabilitas TIK oleh Responden. Hasil penelitian kuisioner kepada responden mengenai infrastruktur kapabilitas TIK di Setjen DPR RI dapat dilihat pada Tabel 3. Sarana komunikasi modern berbasis digital memudahkan pegawai mencapai kinerja yang optimal di Setjen DPR RI (sebanyak 53 responden), Perubahan tata ruang kantor membuat kenyamanan bagi pegawai yang bekerja (sebanyak 54 responden), Adanya perangkat komputer *online* yang memudahkan pegawai untuk melihat keadaan lingkungan Setjen DPR RI (sebanyak 54 responden), Adanya media komunikasi internal baik formal maupun informal yang memadai untuk memastikan pegawai Setjen berkomunikasi dengan baik satu sama lain (sebanyak 61 responden), Perekrutan pegawai yang dilakukan oleh Setjen sudah menggunakan teknologi digital (sebanyak 48 responden), Dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk mendukung proses digitalisasi (sebanyak 59 responden), Setjen DPR RI selalu melakukan inovasi terhadap sistem informasi dan aplikasi TIK yang terkini (sebanyak 52 responden), Fasilitas kantor yang diberikan sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi terkini (sebanyak 50 responden), Semakin baik tingkat pengetahuan yang dimiliki pegawai akan membantu untuk

melakukan perubahan yang lebih baik (sebanyak 51 responden), dan Melakukan evaluasi secara bertahap dan mengatasi masalah dengan baik (sebanyak 53 responden).

Nilai terendah pada indikator infrastruktur adalah masih kurang tersedianya media komunikasi internal, baik formal maupun informal yang memadai untuk memastikan pegawai Setjen berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Perekrutan pegawai yang dilakukan oleh Setjen masih ada yang tidak menggunakan teknologi digital. Fasilitas kantor yang diberikan masih belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini, dan kurang dilakukannya evaluasi secara bertahap dan mengatasi masalah dengan baik. Secara keseluruhan modus ataupun nilai hasil jawaban responden yang sering muncul pada bobot 4 yang berarti secara keseluruhan kapabilitas TIK setjen DPR RI sudah baik.

Pengenalan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses demokrasi dan politik membuka peluang dan ruang baru untuk meningkatkan demokrasi dengan melibatkan warga negara dalam proses kebijakan yang mempertahankan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam kehidupan publik dalam hal kontribusi efektif dan kesadaran akan urusan publik.

Teknologi baru menggerakkan demokrasi menuju sistem perwakilan yang terdesentralisasi dengan mengintegrasikan demokrasi partisipatif, langsung dan representatif. Kapabilitas Teknologi informasi membantu membangun pembuatan kebijakan dan meningkatkan kualitas tata pemerintahan demokratis dimana melibatkan warga negara yang ingin berpartisipasi, sehingga mereka dapat memberikan pengaruh pada perilaku legislator sebagai perwakilan rakyat.

Indeks Penilaian yang didapatkan dari pengolahan hasil kuisisioner sudah baik diatas 60% dapat dilihat pada tabel 3. Rata-rata responden menjawab “Setuju” dan “Sangat Setuju” yang berarti sarana komunikasi yang modern berbasis digital memudahkan pegawai mencapai kinerja yang optimal di Setjen DPR RI.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa indeks penilaian dari pernyataan menunjukkan hasil diatas 76% yang berarti responden setuju bahwa kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi dari sisi infrastruktur di Setjen DPR RI sudah baik. Hanya saja pemanfaatan dari aplikasi serta teknologi yang sudah dibuat belum maksimal. Baik dari sisi pegawai setjen, anggota dewan serta masyarakat luas belum memanfaatkan kapabilitas TIK yang sudah dimiliki setjen DPR RI dalam pekerjaan mereka, sehingga wujud parlemen ataupun DPR RI modern belum tercapai. Kapabilitas TIK yang disosialisasikan dan digunakan secara maksimal akan berdampak pada DPPRI yang efisien di mana para pemangku kepentingan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan fungsi utama mereka dalam pembuatan undang-undang/legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan secara lebih efektif. Kapabilitas TIK melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dijelaskan di pembahasan akan menjadikan DPR RI modern yang berarti lebih terbuka, transparan dan bertanggung jawab, mendorong orang untuk lebih terlibat dalam kehidupan publik dengan memberikan informasi yang berkualitas dan akses yang lebih besar ke dokumen dan kegiatan DPR RI atau badan legislatif agar warga negara berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan maupun perundang-undangan. Kapabilitas TIK ini juga menjadikan pegawai atau setjen menjadi andal sebagai sistem pendukung kegiatan DPR RI dan kepercayaan publik terhadap DPR RI semakin meningkat.

REKOMENDASI

1. Memaksimalkan penggunaan TIK didalam lingkungan setjen DPR RI antara unit kerja

sehingga pegawai Setjen semakin terbiasa dengan aplikasi yang sudah disediakan.

2. Mendorong anggota dewan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.
3. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk sarana dan prasarana TIK.
4. Setjen DPR RI harus melakukan sosialisasi serta pelatihan kepada pegawai maupun anggota dewan mengenai aplikasi maupun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjadikan DPR RI modern.
5. Kapabilitas Teknologi informasi yang sudah baik di setjen secara infrastruktur dapat memperkuat dan mengubah DPPRI. Para anggota dewan harus memberikan kepemimpinan politik yang mendukung keterbukaan yang lebih besar dan partisipasi warga negara. DPR RI harus berbuat lebih banyak untuk terlibat di tingkat politik tertinggi dengan potensi transformasi digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan DPR -RI, Program Doktor Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor, Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III di lingkungan Setjen DPR RI, dan seluruh pihak yang telah memberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Assauri, S. 2013. *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*. Depok: Raja grafindo Persada.

Azed, A.B. 2014. *Menyoroti Kinerja Legislasi DPR. Legalitas Edisi Juni*. 6 (1), hal 1-31.

Berghaus, S. dan Back, A. 2016. *Stages in Digital Business Transformation: Results of an Empirical Maturity Study*, MCIS 2016: Proceedings Vol. 22 [Online]. Dari: <https://aisel.aisnet.org/mcis2016/22>.

Chakravarty, A., Grewal, R., dan Sambamurthy, V. 2013, *Information technology competencies, organizational agility, and firm performance: Enabling and facilitating roles*. *Information Systems Research* 4(4), hal 976-997.

Coleman, S. dan Spiller, J. 2003. *Exploring New Media. Effects on Representative Democracy*. *Journal of Legislative Studies* 9(3), hal 1-16.

Denhardt, R.B., dan Denhardt, V.J. 2001. *The New Public Service: Putting Democracy First*. *National Civic Review* 90(4), hal 391-400

- Furkon, A.M., Kumoro, B., Mustikawati, I.G., Thatcher, M. 2012. Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang. Jakarta: The Habibie Center.
- Geczi, E. 2007. Sustainability and Public Participation: Toward an Inclusive Model of Democracy. *Administrative Theory & Praxis* 29(3), hal 375-393.
- Kubick, W.R. 2012. Big Data, Information and Meaning. In: *Clinical Trial Insights*, pp. 26-28.
- Layne, K. dan Lee, J. 2001. Developing Fully Functional e-Government A Four Stage Model. *Government Information Quarterly* 18, hal 122-136.
- Leston-Bandeira, C. 2014. The Pursuit of Legitimacy as a Key Driver for Public Engagement: The European Parliament Case. *Parliamentary Affairs* 67(2), hal 415-436.
- Luftman, J., Lyytinen, K. dan Zvi, T. B. 2017. Enhancing the measurement of information technology (IT) business alignment and its influence on company performance, *Journal of Information Technology* 32(1), hal 26-46
- Mikalef, P. dan Pateli, A. 2017. Information technology-enabled dynamic capabilities and their indirect effect on competitive performance: Findings from PLS-SEM and fsQCA, *Journal of Business Research*, 70, hal 1-16.
- Pérez-López, S. dan Alegre, J. 2012, Information technology competency, knowledge processes and firm performance. *Industrial Management & Data Systems* 112(40), hal 644-662.
- Queiroz, M., Tallon, P., Sharma, R. dan Coltman, T. 2018. The role of IT application orchestration capability in improving agility and performance, *The Journal of Strategic Information Systems*, 27(1), hal 4-21.
- Rasaili, W. 2019. Kinerja DPR dan Kepercayaan Publik: (Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI tahun 2014 - 2019). [Online]. Dari: <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/221/186>
- Riduwan. 2015. Dasar-Dasar Statistika, Bandung: Alfabeta.
- Rudhiawan, F.A. 2015. Peran Humas Setjen DPRI RI dalam Upaya Mengelola Citra Positif DPR RI di Mata Publik. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Romanelli, M. 2016. New technologies for parliaments managing knowledge for sustaining democracy. *Management Dynamics in the Knowledge Economy* 4(4), hal 649-666. Dari: <https://search.proquest.com/docview/1861825385?accountid=32819>
- [SETJEN DPR RI] Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat. 2016. Rencana Strategis Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019. Jakarta: Setjen DPR RI.
- Anonim. 2018. Laporan Kinerja 2018. Jakarta: Setjen DPR RI.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Zhang, M., Sarker, S., dan Sarker, S. 2008. Unpacking the effect of IT capability on the performance of exportfocused SMEs: a report from China. *Information System Journal* 18(4), hal 357-380